

ABSTRAK

Tulisan ini dilatar belakangi bahwa Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki peran yang sangat strategis,

Rumusan masalah **penelitian ini** meliputi bagaimana Peran, bagaimana kendala dan Bagaimana penguatan strategi Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal yang dapat dikategorikan kedalam penelitian kualitatif yang diharapkan mendapatkan data yang mendalam dan data yang mengandung makna.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama* Peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum berjalan dengan optimal. *Kedua*, Kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah meliputi : belum ada 3 (tiga) regulasi Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), keterbatasan pengetahuan, , personil Satpol PP terbatas, kurangnya Sarana dan Prasana, anggaran yang minim , tidak ada intelejen, kepatuhan hukum PKL masih rendah, , dan adanya PKL yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU).

Ketiga strategi yang digunakan *pertama* Strategi Internal, meliputi : pembuatan 3 (tiga) regulasi yaitu pembuatan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Ketertiban Umum dan, Ketentraman Masyarakat, Pembuatan Peraturan Bupati Batang tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah No 6 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pembuatan Peraturan Bupati Batang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pengiriman diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Kumpulan Perundang-undangan Elektronik (E-DOI KUPER), penambahan Personil, Penambahan Sarana dan Prasarana, Penambahan anggaran, dan Pengiriman diklat dasar Satpol PP dan Intelejen Dasar *Kedua*, Strategi Ekternal, meliputi : Sosialisasi secara berkala kepada PKL dengan materi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, adanya program keterpaduan konsep dan implementasi antar organisasi pemerintah daerah dalam penegakkan perda terkait penataan dan pemberdayaan PKL, pembuatan data base PKL, pengawasan secara terpadu, pembuatan zone PKL, koordinasi, dan Pembuatan Tanda Daftar Usaha (TDU).

Kata Kunci : Strategi Penguatan Peran Satpol PP, Penegakan Peraturan Daerah Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

This article background that Satpol PP regulation in the enforcement of local regulations district bar number 6 2014 on the arrangement and empowerment Street vendors (pkl) have a role strategic.

Problem formulation of this study include how the role, how constraints and how the strengthening of strategy Satpol regulation in the enforcement of local regulations (regulation) district bar number 6 2014 on the arrangement and empowerment Street vendors.

this research method using the research non doctrinal that can be categorized into the qualitative research expected get data deep and data containing the meaning.

The results showed that first Satpol PP regulation in the enforcement of local regulations (regulation) district bar number 6 2014 on the arrangement and empowerment Street vendors have not been running with optimal. second, constraints encountered in enforcement area include: there is no 3 (three) regulation of local regulations / regulations Regent, the lack of civil servant investigators (ppns), the limitations of knowledge personnel satpol PP regulation limited, the lack of facilities and prasana, budget minimal, there is no intelligence, legal compliance pkl still low, and the Street vendors who do not have a sign list of business (tdu). the third strategy used pertamastrategi internal, include: making of 3 (three) regulation that rulemaking area / regulations Regents of the public order and, tranquility community, rulemaking Regent stem of guidelines local regulation No. 6 on structuring and empowerment Street vendors, rulemaking Regent stem of guidelines local regulation No. 1 2017 of empowerment micro small and medium, delivery training civil servant investigators, making the documentation and information collection of legislation electronics (ha-DOI Kuper), the addition of personnel, the addition of infrastructure, the addition of budget, and delivery training basic satpol PP regulation and intelligence basic second, strategy external, include: socialization periodically to pkl with material regulation district bar number 6 2014 on the arrangement and empowerment Street vendors, the program integration concept and implementation of Inter-organizational local government in enforcement regulation related structuring and empowerment Street vendors, making the data base Street vendors, supervision integrated, making zone Street vendors, coordination, and making sign list of business (tdu).

Keywords: strategy strengthening the role of Satpol PP regulation, enforcement area Street vendors